

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

PENGARUH ZIS DAN KORUPSI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Reska Prihatini¹, Muhammad Anwar Fathoni², Mira Rahmi³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹reska.prihatini@unpvj.ac.id

²mfathoni@upnvj.ac.id

³mirarahmi@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, serta mengetahui seberapa besar pengaruh ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, dengan data yang bersumber dari data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Transparency International, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian menggunakan jenis data kuantitatif, data *time series* yaitu runtun waktu tahun 2010 sampai 2019, dengan regresi linier berganda IBM SPSS Statistics 26 sebagai pengolah data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel korupsi berpengaruh positif signifikan, hal ini karena Indonesia memiliki sejarah akan tindak korupsi, dan institusi yang tidak baik. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS dan korupsi berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan. Implikasi dari penelitian ini adalah dana ZIS dapat membantu mengurangi ketimpangan, sementara temuan dari pembahasan korupsi dapat menyebabkan pemerataan yang tidak membawa kesejahteraan, karena banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah.

Kata Kunci: ketimpangan pendapatan; ZIS; korupsi.

Abstract

This study tries to explain and determine the impact of ZIS (Zakat, Infak, and Alms) and corruption on income inequality in Indonesian. This study uses a saturated sample, with data sourced from Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Transparency International, Badan Pusat Statistik (BPS). The research uses quantitative data types, time series data from 2010 to 2019, with multiple linear regression IBM SPSS Statistics 26 as data processing. The findings of this study indicate that ZIS has a significant negative effect on income inequality. While the corruption variable has a significant positive effect, this is because Indonesia has a history of corruption and bad institutions. Furthermore, the results of the study show that ZIS and corruption have a joint effect on income inequality. The implication of this research is that ZIS can help reduce inequality, while the findings from the discussion of corruption can lead to equity that does not bring prosperity, because many people work in the informal sector with low incomes.

Keywords: income inequality; ZIS; corruption.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

PENDAHULUAN

Terdapat 85 persen penduduk Indonesia yang beragama Islam atau 229.711.974 jiwa di tahun 2019. Hal ini membuat pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2002 sampai 2019 yaitu sebesar 34,33 persen (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Potensi zakat Indonesia mencapai Rp233,6 triliun, dengan potensi paling besar dimiliki oleh Jawa Barat dengan Rp26,845,7 miliar. Penghimpunan zakat secara nasional mengalami rata-rata tumbuh sebesar 30,55 persen (BAZNASJABAR, 2019). Tercatat zakat secara nasional pada tahun 2019 mencapai 10,2 triliun, hal ini jika dibandingkan dengan penyaluran terhadap pengumpulan yaitu mencapai 84,57 persen. Meskipun terdapat jarak antara potensi dan realisasi, namun capaian ini dapat dikatakan efektif berdasarkan *Zakat Core Principles* (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Namun capaian ini tidak begitu diikuti pada bidang korupsi.

Indonesia pada tahun 2020 dari 128 negara dalam *The World Justice Project Rule of Law Index*, berada pada peringkat ke 92 dengan skor 0,39 dalam kategori *Absence of Corruption* yang mempertimbangkan tiga bentuk korupsi seperti penyuapan, dipengaruhi oleh kepentingan publik atau swasta, dan penyelewengan dana publik atau sumber daya lainnya. Sedangkan dalam *Overview of Scores and Rankings* yang mencakup seperti *Open Government, Fundamental Rights, Civil Justice*, dan lainnya. Indonesia memperoleh skor 0,53 dan berada di peringkat 59. Sistem ini menggunakan skor berkisar dari 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan kepatuhan terkuat terhadap aturan hukum (World Justice Project, 2020). Disisi lain terdapat temuan trade-off antara korupsi dan ketimpangan di Amerika Latin. Hal ini karena sektor informal yang besar dan kebijakan pengurangan korupsi membebaskan biaya transaksi, selanjutnya reformasi kelembagaan dapat memperburuk ketimpangan (Dobson & Ramlogan, 2010). Fenomena korupsi pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang menerima kebijakan, dan bagi masa depan anak-anak di berbagai belahan negara.

Pada anak usia 8, hampir semua anak di Ethiopia, yang hidup dalam kemiskinan memiliki kesulitan dalam membaca. Pada usia 12 tahun, tingkat stunting anak-anak yang hidup dalam kemiskinan di Peru, empat kali lebih besar daripada tingkat stunting anak-anak lainnya. Pada usia 19 tahun, wanita muda di pedesaan Andhra Pradesh (India) dua kali lebih mungkin menjadi ibu, daripada wanita muda di perkotaan (Dornan & Woodhead, 2015). Lebih lanjut, satu dari tujuh warga di Indonesia melaporkan membayar suap untuk mengakses layanan utilitas, dan seperempat warga melaporkan telah membayar suap untuk pelayanan dokumen identitas (World Forum Ekonomi 2016 dalam Merkle, 2018). Tahun 2018, korupsi merugikan pemerintah Indonesia hampir Rp5,6 triliun atau senilai dengan US\$401,45 juta. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, sekitar 89 persen kasus terjadi di tingkat kabupaten dan desa, sementara 11 persen pada tingkat nasional (The Jakarta Post, 2019). Hal ini tentu menjadi fokus utama dalam anggaran APBN 2020 dimana tercatatnya berbagai program pemerintah yang terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya penurunan ketimpangan pendapatan (MOF Indonesia, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks GINI pada angka 0,382 pada Maret 2019, angka ketimpangan ini memberikan penurunan dengan angka 0,002 dibandingkan pada bulan September di tahun 2018 yang mencapai 0,384 (BPS, 2019a). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, serta mengetahui seberapa besar pengaruh ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Novelty pada penelitian ini adalah bahwa belum ada penelitian mengenai pengaruh ZIS dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

TINJAUAN PUSTAKA

ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Sistem sosial Islam tidak saling menindas antara kehidupan sosial. Sistem sosial Islam menekankan pada keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat. Sistem yang ada tidak boros dan tidak berlebih-lebihan, pun juga tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan bagi mereka yang menganutnya. Islam memberikan hak pada setiap orang tanpa terkecuali secara utuh dan menuntut penunaian segala kewajiban para penganutnya (Moh Khasan, 2011). Dalam islam, zakat dan pendapatan disalurkan secara optimal, adil, dan merata dinilai mampu mengatasi kesenjangan yang menjadi masalah selama ini. Karena kepuasan dan pemenuhan kebutuhan orang kaya dengan menunaikan kewajibannya dan orang miskin dapat terpenuhi secara bersamaan (Rohim, 2018). Berdasarkan QS. Al-Hasyr (59): 7 menjelaskan tentang distribusi harta:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Hal yang ditekankan dalam konsep penyaluran pendapatan adalah adanya orang lain dari setiap pendapatan yang diperoleh, serta Allah dan Rasul-Nya. Ini juga digunakan sebagai bentuk jaminan sosial dengan keluarga maupun orang lain. Oleh karena itu, perlu dipastikan untuk tidak adanya ketimpangan pendapatan dan penegakan keadilan sosial (Almizan, 2016). Indikator ZIS menggunakan besaran miliar yang didapat dari Statistik Zakat Nasional 2019 selama sepuluh tahun yaitu 2010-2019 melalui pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) yang ada pada BAZNAS. BAZNAS dipilih karena memiliki 1 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) RI, 34 OPZ yang tersebar di seluruh provinsi, 456 OPZ kab/kota yang memiliki pertimbangan pemimpin, 26 OPZ Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, 18 OPZ LAZ skala provinsi, 37 OPZ LAZ skala kab/kota (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Kaitan hubungan dari dana sosial islam dengan ketimpangan pendapatan adalah dapat di lihat dari tujuan ZIS itu sendiri.

Dimana dalam dana sosial islam memiliki tujuan utama untuk mendistribusikan harta dan zakat masuk ke dalam rukun islam, meskipun pada kenyataannya tingkat partisipasi zakat masih jauh dari angka ekspektasi. Meskipun begitu, zakat dapat mengurangi ketimpangan. Zakat memiliki pengaruh dalam meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga dan penurunan ketimpangan (Rini et al., 2012). Ayuniyyah et al. (2018) dengan judul *Zakat For Poverty Alleviation And Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia*. Studi kasus dari penerima zakat yang dikelola dengan jumlah 1.309 oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS), dikarenakan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang koordinator zakat di negara Indonesia. Dengan cakupan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Bogor, Depok, dan Sukabumi. Hasil menghasilkan dan menjelaskan, kebanyakan program penyaluran zakat bisa menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi di antara penerima zakat. Penelitian lain yang dilakukan Munandar et al. (2020) dalam judul Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. Menggunakan metode regresi linier berganda dengan variabel kemiskinan, ZIS, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil menampilkan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk itu hipotesis pada variabel ZIS terhadap indeks GINI atau

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

ketimpangan pendapatan adalah negatif signifikan.

Korupsi

Transparency International mengartikan korupsi sebagai “*the abuse of entrusted power for private gain.*” (Transparency International, n.d.). Definisi ini menangkap masalah agen utama di akar semua jenis korupsi ekonomi dan politik penyuaipan, penggelapan, nepotisme, pengendalian pengaruh (sejenis nepotisme), konflik kepentingan, kecurangan akuntansi, kecurangan pemilu, dan bentuk lainnya (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki birokrasi dan lembaga yang tidak efisien, memiliki kecenderungan korupsi. Korupsi dapat meningkatkan ketimpangan dalam hal berikut: terganggunya distribusi pendapatan, penggunaan aliran bantuan, dan tidak maksimalnya pembuatan kebijakan pada anggaran pengeluaran publik. Peningkatan korupsi meningkatkan indeks GINI pada ketimpangan pendapatan dalam konteks yang beragam. Korupsi dapat meruntuhkan kemampuan kapasitas pemerintah untuk menyediakan distribusi sumber daya yang dapat dilakukan lebih adil. Hal lain yang menyebabkan korupsi menciptakan distribusi kekayaan yang tidak rata adalah dengan menciptakan sistem pajak yang bias (U4 Expert Answer, n.d.). Namun temuan lain menampilkan bahwa korupsi terhadap ketimpangan menghasilkan pengaruh yang positif di Amerika Latin.

Hal ini karena Amerika Latin memiliki sektor informal yang besar dan kebijakan pengurangan korupsi membebaskan biaya transaksi. Selanjutnya langkah redistributif yang didorong oleh unsur-unsur korup di masyarakat, sering kali dipotong dengan reformasi kelembagaan dan ini dapat memperburuk ketimpangan (Dobson & Ramlogan, 2010). Temuan lain yang serupa bahwa indeks korupsi yang meningkat dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia dilakukan oleh Iskandar (2018). Meskipun begitu, meningkatnya ketimpangan yang disebabkan oleh korupsi dapat memperburuk dan berdampak pada posisi kaum termiskin yang ada di masyarakat karena korupsi dapat mengurangi sumber daya yang tersedia yang seharusnya digunakan untuk anggaran dana sosial. Sanjeev Gupta (1998), dengan judul *Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?* In IMF Working Papers. Penelitian dengan *cross-country* data tahun 1980-1997. Hasil menunjukkan korupsi memberikan efek ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan melalui berbagai aspek, termasuk pertumbuhan secara keseluruhan, sistem pajak yang bias, kurang baiknya penyaluran program sosial dan hal ini berdampak pada kepemilikan aset, formasi SDM (Sumber Daya Manusia), tidak meratanya pendidikan, dan ketidaktepatan data.

Hal lain adalah korupsi berdampak negatif pada pengadaan kualitas dan kuantitas layanan publik yang menjadi hak masyarakat, seperti pemberian layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas, pemberian subsidi, serta pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dilihat secara luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk tujuan yang tidak resmi. Tindakan dari korupsi tidak terbatas pada penyuaipan, pemerasan, penjajakan pengaruh, nepotisme, penipuan, penggunaan “*speed money*” (uang yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah untuk mempercepat pertimbangan mereka tentang masalah bisnis yang berada dalam yurisdiksi mereka), dan penggelapan. Meskipun orang cenderung menganggap korupsi sebagai dosa yang dilakukan di kalangan pemerintah, korupsi juga ada di sektor swasta. Oleh karenanya, sektor swasta terlibat dalam sebagian besar korupsi yang ada pada pemerintah. Selain itu korupsi dapat melemahkan aturan yang telah ada seperti misalnya, sistem peradilan, atau hak milik, atau perbankan dan kredit yang dapat menghancurkan pembangunan ekonomi dan politik. Korupsi juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan, yaitu dengan memungkinkan para pencemar atau kelompok yang memiliki usaha tertentu mengotori sungai, atau rumah sakit untuk memeras pembayaran yang

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

terlalu tinggi kepada pasien, oleh karena itu korupsi dapat merusak lingkungan dan sosial (Klitgaard, 1998). Untuk itu hipotesis pada variabel korupsi terhadap indeks GINI adalah negatif signifikan seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini.



Hubungan Korupsi dan Ketimpangan

Sumber: Chetwynd (2003) Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan data yang didapatkan peneliti dengan cara sekunder. Data sekunder biasanya merupakan bukti suatu catatan, histori laporan tahunan yang disusun dalam laporan yang didapatkan dari situs internet yaitu ZIS dari Badan Amil Zkat Nasional (BAZNAS) dengan satuan miliar, data korupsi dengan indikator IPK dengan indeks 0-100 pada situs Transparency International, dan tingkat ketimpangan pendapatan dengan indeks 0-1 pada situs Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode pengamatan tahun 2010-2019 dengan *non probability sample*. Tahapan penelitian dalam metode regresi ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, dengan memenuhi syarat uji asumsi klasik yang sudah ditentukan dan dipersyaratkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik sudah memenuhi syarat, untuk itu maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji F dalam penelitian ini, bertujuan untuk menguji hubungan yang terkait dalam variabel independen yang terdapat pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis F yang telah di olah diantaranya yaitu:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	2	.000	5.010	.045 ^b
	Residual	.001	7	.000		
	Total	.002	9			

a. Dependent Variable: Ketimpangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Korupsi (X2), ZIS (X1)

Dalam tahap ini, yaitu Uji F menggunakan cara untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama, yaitu dengan ada atau tidaknya dampak terhadap variabel dependen. Hasil yang didapatkan dari regresi penelitian ini, yaitu uji F menggunakan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

ketentuan alpha 5 % jika probabilitas < alpha 5% untuk itu variabel berpengaruh signifikan dan positif secara bersama-sama. Berdasarkan data tabel di atas diperoleh F-hitung sebesar 5,010 dan sig 0,045. F-tabel pada taraf $\alpha= 0.05$, df1 (jumlah variabel independen) 2 dan df2 ($n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$), maka nilai Ftabel = 4,747. Hal ini berarti Fhitung > Ftabel (5,010 > 4,747) dan sig < 0,05 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada penelitian ini dalam uji F ini yaitu 0,045 dan dapat diartikan signifikan, dan variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (0,045 < 0,05). Untuk itu hipotesis ketiga dapat diterima. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa variabel ZIS, dan korupsi secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga kedua variabel independen tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel ketimpangan pendapatan.

R² atau Koefisien determinasi menghitung tingkat atau/ seberapa jauh kekuatan dari suatu model dalam menjelaskan variasi dari variabel ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien determinasi ada di antara angka nol hingga satu. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan nyaris semua informasi yang dibutuhkan, untuk meramalkan ragam dari variabel ketimpangan pendapatan.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 ^a	.589	.471	.009562
a. Predictors: (Constant), Korupsi (X2), ZIS (X1)				

Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi, adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam suatu model. Karena itu, dianjurkan untuk menggunakan adjusted R Square (R²) pada saat melakukan evaluasi model regresi terbaik. Dengan menggunakan bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,767. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 76,7%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen kuat.

Besarnya Adjust R Square (R²) adalah 0,589. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 58,9%, sedangkan sisanya sebesar 41,1% (100% - 58,9%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Selanjutnya Uji t adalah langkah yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian adalah dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-value (sig-t), dengan taraf signifikansi yang ditentukan adalah 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka menunjukkan H_a diterima, dan sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H_a yang ditolak.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.256	.058		4.426	.003
	ZIS (X1)	-8.081	.000	-1.794	-3.113	.017
	Korupsi (X2)	.005	.002	1.488	2.583	.036
a. Dependent Variable: Ketimpangan (Y)						

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

Hasil yang didapatkan dalam uji t diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu ZIS seperti pada tabel diatas dengan t hitung sebesar $-3.113 < t$ tabel -2.364 dengan probabilitas sebesar $0,017$ yang nilainya berada di bawah $0,05$ dengan demikian H1 diterima. Hasil uji t pada variabel korupsi (X2) diperoleh t hitung sebesar $2.583 > t$ tabel 2.364 dengan probabilitas yang menunjukkan angka $0,036$ nilai ini menunjukkan angka dibawah $0,05$ dengan demikian H2 ditolak karena memiliki arah beta yang berbeda dari hipotesis yaitu dengan hipotesis yang bergerak ke dua arah (negatif) sementara hasil menunjukkan satu arah (positif).

Pengaruh ZIS Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan output SPSS yang ditampilkan pada uji t dan regresi linier berganda, menunjukkan bahwa ZIS berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai probabilitas $0,017 < 0,05$ dan dengan nilai t hitung $-3,113 < t$ tabel $-2,364$, maka hipotesis pertama (H₁) di dalam penelitian ini diterima. Artinya antara ZIS dengan ketimpangan pendapatan memiliki pergerakan arah negatif yang berlainan arah/dua arah atau dengan kata lain, apabila pertumbuhan pengumpulan ZIS pada BAZNAS naik, hal ini akan menyebabkan penurunan pada indeks GINI yang mencerminkan ketimpangan pendapatan dan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Munandar et al. (2020) yang menghasilkan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun penelitian ini menggunakan variabel dependen kemiskinan dan Ayuniyyah et al. (2018), yang menghasilkan penelitian bahwa zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan yang ada di Jawa Barat yaitu Bogor, Depok, dan Sukabumi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya program penyaluran zakat dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi di antara penerima zakat. Meskipun begitu perlu adanya peningkatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Hal ini dikarenakan lembaga penyaluran harta keagamaan seperti BAZNAS dalam hasil penelitian dari Firmansyah (2013) menunjukkan, terdapat jarak atau *gap* yang signifikan antara realisasi dan potensi zakat di Indonesia, hal ini terbukti pada tahun 2019 total BAZNAS yang terkumpul adalah Rp10,2 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019) dengan potensi Rp233,6 triliun (BAZNASJABAR, 2019), yang mana terdapat perbedaan yang jauh antara realisasi dan potensi. Hal ini karena belum memaksimalkan peran penting dalam penggalangan zakat oleh lembaga resmi. Dapat dijelaskan salah satunya adalah karena masih sedikit pembayar zakat yang masih menyalurkan dananya kepada lembaga zakat resmi. Meskipun begitu ZIS terbukti dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kinerja pengelola dana sosial Islam yaitu BAZNAS dalam mengelola ZIS dan DSKL, yang dimaksudkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan dengan membentuk penyaluran juga pemanfaatan yang tersusun secara terencana. Yaitu dengan mengawasi atau mengobservasi secara terukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang berisi mengenai manajemen zakat guna memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Rancangan yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat beberapa langkah, diantaranya: pertama, penyaluran zakat kepada fakir dan miskin, yaitu dengan pemanfaatan peternak dan juga petani yang termasuk ke dalam golongan fakir juga miskin; kedua, memberikan layanan keuangan mikro bagi fakir dan miskin; ketiga, menambah kesejahteraan usaha berskala mikro yang ada pada masyarakat kelas bawah; keempat, memberikan bantuan beasiswa serta bantuan dalam bidang pendidikan untuk golongan fakir dan miskin; kelima, memberikan akomodasi dalam bidang kesehatan pada tingkat pertama untuk para golongan mustahik; keenam, pemanfaatan bagi golongan mustahik secara

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

berkelompok yaitu dengan program *Zakat Community Development* pada daerah atau desa-desa yang tertinggal; ketujuh, adanya layanan yang bergerak (*mobile*). Hal ini berguna sebagai jalan yang dapat membantu golongan fakir dan miskin; kedelapan, menindak situasi kebencanaan; kesembilan, mengadakan dalam bidang pendidikan, dan penyelenggaraan asrama secara gratis dan juga berkualitas untuk para golongan fakir dan miskin; kesepuluh, memberikan bantuan bantuan dalam bidang pembelaan (advokasi) juga tuntunan untuk para *Muallaf* yang ada di Indonesia (BAZNAS, 2020).

Untuk itu perlu dukungan politik pemerintah dan parlemen Republik Indonesia, termasuk regulasi dan alokasi anggaran pemerintah, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan peran zakat dan BAZNAS sebagai lembaga koordinasi nasional pengelolaan zakat di Indonesia. Kerjasama dan sinergi antara BAZNAS, lembaga zakat lainnya, dan pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia secara lebih efektif dan efisien (Ayuniyyah et al., 2018). Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pengumpulan ZIS agar lebih mudah adalah adanya bentuk pembayaran secara digital seperti Dana, gopay, OVO, dan ShopeePay (BAZNAS Provinsi Bengkulu, n.d.), dan komitmen kolaborasi kerjasama dengan perusahaan pembayaran digital milik BUMN yaitu layanan syariah LinkAja (HUMAS BAZNAS, 2020), juga segenap 225 mitra BAZNAS (BAZNAS, n.d.). Salah satu bentuk kerjasama lain adalah dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang merupakan organisasi yang bergerak pada bidang ekonomi dan keuangan Syariah. MES terdiri dari institusi atau badan syariah dan BAZNAS masuk ke dalamnya. Pimpinan MES telah sering dijabat oleh pejabat tertinggi dari lembaga negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan ini, maka memungkinkannya terkait jalinan antara MES dengan BAZNAS pada hal-hal yang dapat memajukan kedua lembaga ini untuk memaksimalkan potensinya. Selama rentang waktu 2015-2020 sudah adanya beberapa usaha dari kerjasama antara MES dan BAZNAS. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas dan juga meningkatkan usaha-usaha yang telah dilakukan (BAZNAS, 2020).

Pengaruh Korupsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan output SPSS yang ditampilkan pada uji t dan regresi linier berganda, menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai probabilitas $0,036 < 0,05$ dan dengan nilai t hitung $2,583 > 2,364$ t tabel, maka hipotesis kedua (H_2) di dalam penelitian ini ditolak, karena memiliki arah beta yang berbeda dari hipotesis. Artinya antara korupsi dengan ketimpangan pendapatan memiliki pergerakan arah positif yang searah, atau dengan kata lain apabila indeks korupsi meningkat (korupsi yang menurun) dan hal ini akan menyebabkan kenaikan pada indeks GINI yang mencerminkan ketimpangan pendapatan dan begitupun sebaliknya.

Hasil ini menunjukkan pengaruh satu arah, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi indeks korupsi yang artinya menunjukkan suatu negara semakin terlepas dari korupsi dengan poin yang menuju ke arah 100, maka indeks GINI semakin tinggi atau menuju pada angka 1. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dobson & Ramlogan (2010) dengan judul *Is there a trade-off between income inequality and corruption? Evidence from Latin America*. Disebutkan bahwa variabel korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan korupsi ke arah positif adalah karena Amerika Latin memiliki sektor informal yang besar dan kebijakan pengurangan korupsi membebaskan biaya pada perubahan-perubahan yang ada pada sektor informal, dan sering kali dipotong untuk reformasi kelembagaan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan. Perusahaan di sektor informal memiliki biaya operasional yang rendah, dan kurangnya

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

kepatuhan terhadap aturan dan peraturan. Selain itu, proses reformasi yang sebenarnya membutuhkan personel yang lebih terlatih dan infrastruktur pendukung, juga memerlukan tambahan pajak yang didapatkan dari masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini adalah lingkup negara yang dilakukan. Temuan lain yang serupa bahwa indeks korupsi yang meningkat dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia diungkapkan oleh penelitian Iskandar (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2018) menyatakan bahwa korupsi adalah fenomena yang sangat kompleks yang telah dihubungkan dengan berbagai faktor seperti ekonomi, hukum, budaya, dan demografis. Selain itu bentuk korupsi itu sendiri tergantung pada kondisi negara. Dengan demikian, membuat kebijakan untuk upaya anti korupsi menjadi sulit dan mungkin secara fundamental salah arah. Penelitian lain menjelaskan bahwa dalam situasi di mana institusi tidak berkembang dengan baik, korupsi mungkin kondusif untuk pertumbuhan. Korupsi dapat membantu dalam membangun ekonomi, dan menjadi pengganti yang efektif bagi lembaga-lembaga yang buruk dan hukum yang hilang. Korupsi dapat menjadi elemen penting dari sistem ekonomi. Dalam lingkungan seperti itu, korupsi dapat mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan memfasilitasi investasi juga produktivitas, sehingga memberikan sistem alternatif yang di mana efek tidak langsung dari korupsi ini lebih dari sekadar mengkompensasi efek langsung negatifnya (De Vaal & Ebben, 2009). Korupsi dapat membantu mengurangi biaya yang disebabkan oleh proses administrasi yang rumit dalam beberapa konteks pada jangka pendek. Meskipun begitu, korupsi memiliki efek merugikan jangka panjang pada proses berjalannya suatu perusahaan dan dampak korosif pada lingkungan pemerintahan negara secara keseluruhan, mengikis efisiensi dan legitimasi lembaga negara, dan pada akhirnya merusak pembangunan berkelanjutan juga aturan hukum (Chene, 2014).

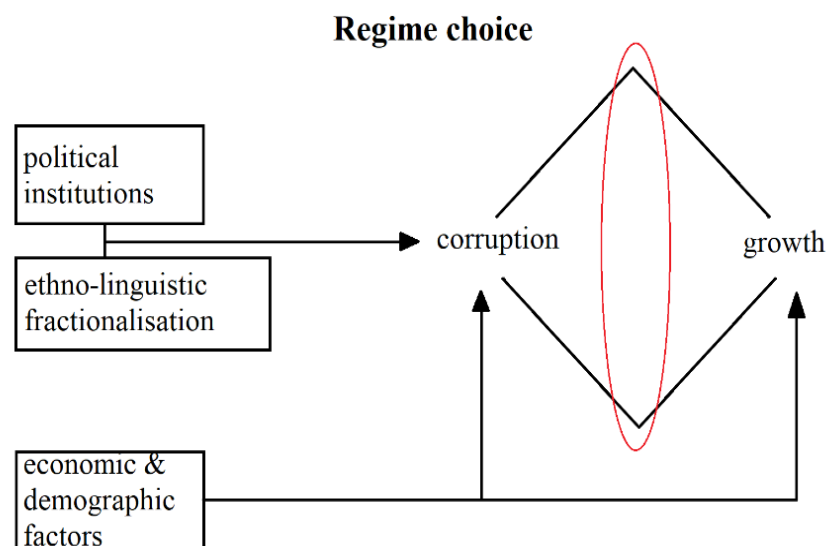
Lebih lanjut dijelaskan mengenai fakta bahwa korupsi tertanam dalam sejarah perkembangan Amerika Latin telah memberikan waktu bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan cara-cara makmur dalam lingkungan yang korup. Dengan demikian, dampak buruk pada ketimpangan berkurang. Oleh karena itu, kondisi awal sangat menentukan keberhasilan kebijakan anti korupsi. Jika pembuat kebijakan berada dalam konflik langsung dengan individu yang telah berhasil mengembangkan bisnis dengan menggunakan sarana yang ada, kebijakan tidak mungkin berhasil dalam jangka pendek. Perusahaan dan individu yang beroperasi sebagian atau seluruhnya di sektor informal menghadapi biaya yang lebih tinggi melalui perbaikan dalam pengumpulan pajak, peraturan dan prosedur baru, perubahan personel, pemolisian, dan penegakan. Para pengusaha semakin sulit untuk bertahan hidup karena hal-hal yang mendorong pertumbuhan sektor informal semakin terkikis, dan jaringan-jaringan yang sudah mapan yang dulunya memfasilitasi produksi mulai menghilang. Efek dari langkah-langkah ini adalah pengurangan ukuran sektor informal, hilangnya pekerjaan dan pendapatan, dan selanjutnya peningkatan ketimpangan pendapatan. Singkatnya, dampak kebijakan anti korupsi di negara-negara dengan institusi yang lemah tidak akan sama dengan di negara-negara dengan institusi yang lebih kuat (Engerman dan Sokoloff (1997, 2000, 2002, 2005) dan Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2002) dalam Dobson & Ramlogan-Dobson, 2012)

Franko dalam Dobson & Ramlogan-Dobson (2012) menjelaskan bahwa jika ada institusi yang lemah, struktur produksi beradaptasi dan mekanisme dikembangkan yang memungkinkan bisnis bekerja di lingkungan yang korup. Korupsi mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menghindari peraturan yang rumit dan memungkinkan efisiensi pada output. Misalnya, di Amerika Latin di bawah rezim proteksionis, individu menyuap pejabat untuk mendapatkan izin impor dan untuk mengabaikan kontrol valuta asing. Houston (2007) mengungkapkan bahwa perjuangan melawan korupsi di negara-negara dengan institusi

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

hukum yang lemah atau buruk juga merupakan perjuangan melawan banyak aspek positif dari korupsi di negara-negara ini, karena korupsi membantu memperluas output. Arah positif korupsi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan karena dampak korupsi terhadap ketimpangan bergantung pada ukuran sektor informal diungkapkan pada penelitian Dobson & Ramlogan-Dobson (2012). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan pada lingkup negara Indonesia, yang dilakukan oleh Nadya & Syafri (2019) dan Ilham & Pangaribowo (2017) dengan hasil yang menunjukkan pada variabel pengangguran yang menghasilkan pengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan. Pengangguran dalam artian ini adalah mereka masuk pada kriteria yang bekerja di sektor informal, hal ini karena pendapatan yang didapatkan di bawah rata-rata. Berdasarkan hasil BPS RI (2019) survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada Agustus bahwa dari 126,51 juta orang yang bekerja, sebanyak 55,72 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal atau sebanyak 70,49 juta orang, kondisi tersebut menyebabkan pemerataan pada masyarakat dengan pendapatan rendah namun tidak memberikan kesejahteraan (World Bank, 2016). Meskipun terdapat argumen dari korupsi berpengaruh negatif ataupun positif terhadap ketimpangan, masalah korupsi tetap harus diatasi. Hal ini karena korupsi dapat menjadi penghambat dari pengentasan ketimpangan pendapatan dalam menyalurkan bantuan, ataupun distribusi dana yang lebih adil dan rata.



Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Aidt et al. (2008)

Korupsi memiliki dampak yang berbeda tergantung pada rezim yang ada pada negara tersebut, dan bahwa efek dari korupsi dapat merugikan pada pertumbuhan di negara-negara dengan tata kelola yang baik, sedangkan memiliki efek sebaliknya terjadi pada pemerintahan yang buruk. Lebih lengkap dapat dijelaskan pada gambar di atas, yaitu dengan keterangan Regime G sebagai rezim dengan institusi berkualitas baik, dan Regime B rezim dengan institusi berkualitas buruk (Aidt et al., 2008). Di Indonesia, rezim Suharto yang sangat mendahulukan kepentingan pribadi dan kerabat telah membuatnya menjadi klientelis, dan meninggalkan aturan-aturan institusi sehingga menjadikan Indonesia dengan negara institusi yang lemah (Barter, 1969). Meskipun tindak korupsi harus disesuaikan berdasarkan situasi negara, Indonesia dapat melihat negara tetangga, yaitu Singapura yang juga merupakan anggota ASEAN, dan juga Hong Kong, dan Botswana dalam mengendalikan masalah korupsi dan ketimpangan pendapatan.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

Lebih lanjut negara Singapura, Hong Kong yang memiliki sistem demokrasi, dan Botswana yang juga merupakan negara berkembang. Hal pertama adalah karena negara tersebut memiliki ukuran yang kecil, sehingga lebih mudah memantau korupsi. Selanjutnya ketiga negara tersebut relatif kaya, sehingga menaklukkan korupsi dapat dilakukan dengan ongkos yang jauh lebih murah atau dapat dikatakan tidak menggunakan biaya yang banyak. Kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam kampanye anti-korupsi, mulai dari pelajaran moralitas di sekolah dasar, hingga kampanye massal untuk melaporkan tindakan ilegal dan, terutama, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semua ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, sehingga masyarakat secara sadar merasa tidak perlu mendukung pemimpin yang korup. Terakhir dan paling penting, bahwa ketiga negara menghadapi ancaman eksternal: Botswana dikelilingi oleh Afrika Selatan dan (kemudian disebut) Rhodesia. Singapura dan Hong Kong menghadapi ancaman terhadap sistem ekonomi dan politik mereka oleh serikat radikal yang didukung oleh China. Untuk mendapatkan dukungan publik mereka terhadap oposisi negara tersebut, para pemimpin harus membuat kehidupan warga negara mereka lebih baik. Untuk itu, mereka perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat iklim investasi semakin kuat. Singapura dan Hong Kong menjadi kaya (dan Botswana relatif baik) dengan jujur dan meningkatkan kehidupan warga negara mereka (Uslaner, 2011).

Pengaruh ZIS dan Korupsi Secara Bersama-Sama Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari pengolahan data, dan berdasarkan hasil dari perhitungan uji F, diperoleh F hitung sebesar 5,010 dengan sig 0,045. Dengan menggunakan F tabel maka menunjukkan $\alpha = 0,05$ dengan $df_1 = 2$, dan $df_2 = 7$ untuk itu diperoleh F tabel sebesar 4,747. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa, F hitung $>$ F tabel dan sig $<$ 0,005 yang memiliki arti bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa variabel ZIS dan korupsi berkontribusi secara bersama-sama, dan berpengaruh secara nyata terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga disimpulkan bahwa, kedua variabel independen tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel ketimpangan pendapatan. Naik dan turunnya ketimpangan pendapatan, dipengaruhi oleh dua pengaruh yaitu ZIS dan korupsi.

ZIS yang memiliki fungsi dalam mendistribusikan harta, dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel ZIS memberikan manfaat untuk menghilangkan sifat kikir dan membersihkan jiwa, hal lain adalah bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang didapatkan. Sedangkan korupsi yang diukur melalui indeks, menghasilkan pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Penyebab korupsi berbeda-beda di setiap negara dan hal ini bergantung pada kebijakan nasional, sejarah, tradisi birokrasi, dan perkembangan politik (Martini, 2012). Indonesia memiliki sejarah dengan bertahun-tahun dipimpin oleh rezim orde baru yang otoriter, orde Baru bukanlah kediktatoran dalam arti sempit, melainkan oligarki. Suharto memerintah negara dengan dikelilingi oleh jaring-jaring terdekatnya. Suharto memastikan keluarga besarnya serta teman-teman dari dunia bisnis, dan militer diberikan hak untuk mendapatkan kontrak pasokan eksklusif, keringanan pajak, memonopoli perusahaan negara, dan lembaga pemerintah. Suharto dan lingkarannya mengontrol akses ke setiap tingkat kekuasaan, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi keagamaan (Barter, 1969). Selain itu, Indonesia memiliki sistem desentralisasi, yang mulai diterapkan pada tahun 2001, bertujuan antara lain untuk mengakhiri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan memberdayakan pemerintah daerah di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun, reformasi desentralisasi belum membawa hasil yang diharapkan. Desentralisasi di Indonesia memiliki mekanisme

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

akuntabilitas yang lemah transparansi, hal ini pula yang menjadi tantangan bagi keberhasilan proses desentralisasi dan menghambat pemberantasan korupsi (Martini, 2012).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen ZIS (X1) dan korupsi (X2) terhadap variabel terikat ketimpangan pendapatan (Y), secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan. Pembuat kebijakan harus memperkenalkan langkah-langkah anti korupsi sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan. Namun pada Amerika Latin, penelitian yang dilakukan menemukan adanya *trade-off* antara korupsi dan ketimpangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa temuan tersebut berkaitan karena adanya sektor informal yang besar di wilayah tersebut. Untuk itu kebijakan anti korupsi mungkin terjadi dengan salah arah. Khususnya, ketika sektor informal besar, korupsi tidak terlalu merusak ketimpangan. Salah satu implikasi yang jelas adalah bahwa di mana lembaga-lembaga yang lemah (dan sektor informal besar), mungkin berdampak dengan membiarkan korupsi untuk tumbuh. Masalah ini akan membuat korupsi merajalela, dan kemudian negara dapat terjebak dalam situasi korupsi, dengan sektor informal yang berkembang dan kerangka kelembagaan yang tidak efektif. Masalah lain dari banyaknya sektor informal adalah bahwa sektor informal pada dasarnya tidak diatur dengan banyaknya pekerja, sektor informal dapat mencakup orang dewasa dan anak-anak, situasi ini memungkinkan adanya eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak baik (Dobson & Ramlogan-Dobson, 2012).

Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari tindak korupsi adalah dengan meningkatkan minat orang-orang terhadap tindakan berzakat, dan mendistribusikan hartanya. Ini Karena Zakat, sesungguhnya sama seperti gerakan untuk mendorong berkembangnya anti korupsi. Ini dikarenakan orang akan berminat untuk mencari harta yang sifatnya halal saja. Tidak hanya itu, produktivitas individu dari tiap-tiap orang akan meningkat karena zakat dapat membuat semangat kerja dari seseorang meningkat tinggi (Beik, 2010). Memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi manajemen publik, dapat meningkatkan porsi pendapatan pemerintah dan hal ini bertujuan untuk membantu yang miskin dan membutuhkan (Kahf, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Dobson & Ramlogan-Dobson (2012) menunjukkan bahwa efektivitas tindakan anti korupsi kemungkinan akan berkurang di negara-negara dengan sektor informal yang besar. Dengan kata lain, di mana institusi lemah, hubungan antara korupsi dan ketimpangan dapat berubah.

Dapat dilihat pada langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz, untuk usahanya pengentasan kemiskinan. Langkah yang paling efektif adalah dapat dimulai dari penyitaan harta simpanan pejabat, dan relasi atau kawan pejabat yang didapatkan secara ilegal, yang kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat. Selanjutnya adalah dengan memperjuangkan apa yang telah diamanahkan, yaitu pelayanan umat atau khadimul umah. Hal ini berakibat pada pengurangan korupsi yang ada pada birokrasi, serta bidang administrasi. Kejadian ini merupakan hasil penting pada dua tahun masa pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya, dana zakat dan publik yang dikumpulkan dan disalurkan kembali berada pada jumlah terbaik. Peningkatan yang efisien dari manajemen pendapatan publik, serta manajemen zakat yang mencakup pendapatan lain, juga menjadi faktor pendukung yang berguna untuk merawat porsi prioritas anggaran-anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhan publik, dan ini mencakup pemberantasan kemiskinan yang memiliki tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Sementara pada bagian anggaran, dapat disederhanakan untuk menekan jumlah yang terlalu besar dan berkemungkinan menjadi beban. Perlu adanya penyederhanaan APBN dan APBD pada pengeluaran eksekutif dan legislatif di berbagai tingkatan. Pengentasan ekonomi yang paling efektif dapat dimulai dari birokrasi yang bersih, namun juga dengan anggaran penyelenggara negara yang sederhana, dan adanya dana yang tersedia untuk pembangunan serta kesejahteraan sosial yang maksimal (Qomari, 2017). Diungkapkan oleh Klitgaard (1998) bahwa pemberantasan korupsi merupakan masalah yang

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

sulit dan sensitif, sehingga banyak pemimpin politik nasional yang pada prinsipnya mendukung upaya tersebut ragu-ragu untuk melaksanakannya dalam praktik. Langkah yang dapat dilakukan sebagai strategi anti korupsi adalah dengan menghukum pelanggar besar, melibatkan orang-orang dalam mendiagnosis sistem yang korup, fokus pada pencegahan dengan memperbaiki sistem yang korup, reformasi insentif.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan isi dari penelitian ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan dari variabel independen pertama, yaitu ZIS menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa ZIS berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk itu bagi lembaga pengelola dana sosial islam, seperti BAZNAS diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan ZIS dan dana sosial islam lain dalam merealisasikan potensi besar yang ada di Indonesia, dan membangun kepercayaan masyarakat pada lembaga resmi untuk menghimpun dana keagamaan, guna memaksimalkan usaha mengentaskan ketimpangan pendapatan. Sedangkan korupsi, menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Lembaga pemberantas korupsi yang ada di Indonesia yaitu KPK, diharapkan dapat memaksimalkan usaha memberantas korupsi, dan dapat memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya korupsi. Dengan adanya kesadaran di masyarakat bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada segala lini kehidupan, dan salah satunya berdampak pada ketimpangan pendapatan, yang nantinya usaha pemberantasan ini diharapkan dapat membuat Indonesia berangsur-angsur dapat terbebas dari jerat korupsi.

Hasil pengujian secara bersama-sama variabel ZIS dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan, menyatakan bahwa kedua variabel ini berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Bagi pemerintah, hasil yang ada pada penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi ZIS dan menindak kasus korupsi dari sisi kebijakan penengakkan yang dapat diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah dana ZIS dapat membantu mengurangi ketimpangan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi ZIS. Sementara berdasarkan temuan penelitian korupsi dari bab pembahasan, dapat menyebabkan pemerataan yang tidak membawa kesejahteraan karena banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Untuk itu pemerintah dan KPK perlu untuk terus menindak kasus korupsi dari sisi kebijakan, serta cara memperbaiki atau mengurangi sektor informal di Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dan disarankan menggunakan variabel lain yang lebih beragam, dan berkemungkinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang menjadi masalah kompleks di Indonesia. Selain itu peneliti menyarankan untuk menggunakan data antar negara sebagai perbandingan, dengan menambahkan periode penelitian agar dapat menjelaskan secara lebih jauh terkait pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal lain adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai alasan korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, T., Dutta, J., & Sena, V. (2008). Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence. *Journal of Comparative Economics*, 36(2), 195–220. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.11.004>
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 728. <https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179>
- Ayuniyyah, Q., Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, & Muhammad Irwan Ariffin. (2018). Zakat For Poverty Alleviation And Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85–100.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2019). Statistik Zakat Nasional 2019 (National Zakat Statistics 2019). *Baznas*, 1–109.
- Barter, S. J. (1969). The Dangers of Decentralization. Clientelism, the State, & Nature in a Democratic Indonesia. *Federal Governance*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.24908/fg.v5i1.4398>
- BAZNAS. (n.d.). *Mitra BAZNAS*. Retrieved July 16, 2021, from https://baznas.go.id/Mitra_BAZNAS
- BAZNAS. (2020). *Peran BAZNAS dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat dan Korelasi dengan Ekonomi Syariah*. https://baznas.go.id/featured/baca/Peran_BAZNAS_dalam_Membantu_Kesejahteraan_Masyarakat_dan_Korelasi_dengan_Ekonomi_Syariah/28
- BAZNAS Provinsi Bengkulu. (n.d.). *TENTANG BAZNAS*. <https://bengkulu.baznas.go.id/halaman/detail/tentang-baznas>
- BAZNASJABAR. (2019). *Potensi Zakat Di Indonesia 2019 Mencapai 233,6 Triliun*. <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>
- Beik, irfan syauqi. (2010). Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan Dan Kesenjangan: Tiga Dimensi Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Republik*.
- BPS. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS RI. (2019). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2019*.
- Chene, M. (2014). The Impact of Corruption on Growth and Inequality. *Transparency International, March*.
- Chetwynd, E. (2003). *Corruption and Poverty : January*.
- De Vaal, A., & Ebben, W. (2009). Institutions and the Relation between Corruption and Economic Growth. *Nijmegen Center for Economics (NiCE). Institute for Management Research. Radboud University Nijmegen*, 15(1), 108–123. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2010.00596.x>
- Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi*. 1–64.
- Dobson, S., & Ramlogan-Dobson, C. (2012). Why is Corruption Less Harmful to Income Inequality in Latin America? *World Development*, 40(8), 1534–1545. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.015>
- Dobson, S., & Ramlogan, C. (2010). Is there a trade-off between income inequality and corruption? Evidence from Latin America. *Economics Letters*, 107(2), 102–104. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.12.038>
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 429 - 443

- Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 179–190.
- Gupta, S. (1998). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? In *IMF Working Papers* (Vol. 98, Issue 76, p. 1). <https://doi.org/10.5089/9781451849844.001>
- Houston, D. A. (2007). Can corruption ever improve an economy? *Cato Journal*, 27(3), 325–342.
- HUMAS BAZNAS. (2020). *Wapres Saksikan Peresmian Kerjasama BAZNAS dan Layanan Syariah* LinkAja. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Wapres_Saksikan_Peresmian_Kerjasama_BAZNAS_dan_Layanan_Syariah_LinkAja/621
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015*. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/228862-analisis-ketimpangan-ekonomi-menurut-pro-0ea786d1.pdf>
- Iskandar, A. (2018). DOES LESS CORRUPTION REDUCE INCOME INEQUALITY IN INDONESIA ? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, 1–40.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Combating corruption is such a difficult and sensitive issue that many national political leaders who support such efforts in principle are hesitant to undertake them in practice. How can international cooperation help b. *Finance and Development* 35, March, 3–6.
- Martini, M. (2012). Causes of Corruption in Indonesia. *Anti Corruption Resources Centre, August 2012*, 11. <http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890>
- Moh Khasan. (2011). *Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam*. 11(2), 151–172.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 25–38.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–25.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2012). Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(1), 108. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.2230>
- Rohim, A. N. (2018). Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: *Islamic Economics Journal*, 4(2), 155–180.
- Total Population by Country 2021*. (n.d.). Retrieved March 2, 2021, from <https://worldpopulationreview.com/countries>
- U4 Expert Answer. (n.d.). *Correlation Between Corruption and Inequality*. July 2017.
- Uslaner, E. M. (2011). *CORRUPTION AND INEQUALITY*. 2005, 20–24.
- World Bank. (2016). Ketimpangan yang Semakin Lebar. *The World Bank Group*, 43.
- World Justice Project. (2020). Rule of Law Index Rule of Law Index. In *The World Justice Project* (Issue June). <http://www.oecd.org/mena/governance/45447873.pdf>